

Nurhadi DPR RI Fraksi NasDem Gencar Sosialisasi Turunkan Stunting Capai 14 Persen Secara Nasional

Prijo Atmodjo - [KEDIRI.INFORMAN.ID](https://www.kediri.informan.id)

Jul 17, 2022 - 14:47



Nurhadi, S.Pd anggota DPR RI Komisi IX Fraksi NasDem saat menyampaikan sosialisasi di Kelurahan Banaran. (prijo atmodjo)

KEDIRI - BKKBN bersama mitra kerja Anggota DPR RI Komisi IX Nurhadi, S.Pd gelar kegiatan sosialisasi program pembangunan keluarga, kependudukan dan

keluarga berencana (Bangga Kencana) dan penurunan stunting kepada masyarakat di wilayah Kota Kediri berlangsung di Gedung Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri Jawa Timur, Minggu (17/7/2022) pukul 07.30 WIB.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama Nurhadi melaksanakan kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) tentang program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting kepada masyarakat Kota Kediri.

Hadir dalam kegiatan ini, Anggota DPR RI Komisi IX Nurhadi, S.Pd, Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk Uni Hidayati, S.T, M.T, dan Kasi Dalduk DP3P2KB Pemkot Kediri, Choirudin Mustofa Anggota DPRD Kota Kediri Fraksi NasDem dan Kepala Kelurahan Banaran Djumadi.

Usai melakukan sosialisasi terkait penurunan stunting Anggota DPR RI Komisi IX Nurhadi, S.Pd saat dikonfirmasi awak media menyampaikan, terkait stunting Pak Jokowi menargetkan di tahun 2024 nanti, di Indonesia bisa turun angka stunting bisa turun di angka 14 persen, sementara secara umum masih di atas 20 persen. Meskipun, di beberapa Kabupaten dan Kota Kediri ini sudah dibawah 20 persen.

Pihaknya dari Komisi IX DPR RI akan terus mengawal bagaimana target yang diberikan Pak Jokowi ini bisa tercapai di tahun 2024 bisa turun diangka 14 persen.

Nurhadi menegaskan, untuk angka stunting bisa mencapai 14 persen dengan cara terus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Terbukti, seperti kegiatan sosialisasi hari ini, di Balai Desa Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri, terkait penurunan stunting beberapa warga Kota Kediri ketika ditanya apa itu stunting, ternyata masih belum paham.

Setelah mendapatkan sosialisasi dan pemahaman terkait stunting, begitu mereka pulang ke rumah masing-masing mereka akan menjadi agen-agen pencegahan stunting.

Yaitu, dengan cara ketika di lingkungan mereka lingkungan paling kecil ada tetangganya yang ditemukan melahirkan menemukan dengan kondisi bayi tidak normal seperti bayi-bayi yang lainnya. Maka segera disampaikan ke bidan desa atau puskesmas terdekat.

Tak kalah penting, yang belum pernah disampaikan yaitu peran seorang suami kepada istrinya yang sedang hamil. Lanjut Nurhadi bahwa ternyata istri yang sedang mengandung yang utama nafkah batin, jangan diabaikan.

"Kalau istri itu sering dekat dengan suami dan ada perhatian dari suami ini sangat bagus untuk membuat mental secara psikologis istri itu semakin percaya diri dalam persiapan untuk melahirkan nanti. Jadi peran suami sangat membantu terhindar dari stunting, " tutur Nurhadi.

Selain itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan stunting. Ditegaskan Nurhadi yakni, faktor ekonomi terutama di area Kabupaten Kediri, kalau di area Kota

Kediri masih bisa terditeksi, faktor kecukupan gizi baik yang dialami ibu yang masih mengandung bayi maupun sudah melahirkan.

"Kecukupan gizi saya kira masih ada beberapa warga yang belum tercover maka dari Pemerintah, baik BKKBN sinergitas dengan Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten Kediri harus lebih insentif lagi, " urainya.

Disinggung terkait keterlambatan pembayaran honor relawan KB. Dijelaskan Nurhadi juga akan mendorong agar pemberian honor jangan sampai molor dan akan dilakukan koreksi dari BKKBN untuk menyampaikan hak daripada para relawan KB di lapangan.

Kami dari Komisi IX kita juga sampaikan kepada rapat-rapat dengan DPR RI untuk memperhatikan relawan tersebut, tapi kita bersyukur di tingkat desa atau kelurahan banyak relawan yang ikut berjuang tanpa pamrih dalam rangka menurunkan angka stunting tanpa kita mereka dibayar atau diberi honor mereka ikhlas, tapi kalau bisa ya dikasih honor.

"Penyebab keterlambatan pembayaran honor relawan KB, dikarenakan karena administrasi saja, " tutup Nurhadi.